

# Konsep kekuasaan dalam teori strukturasi menurut Anthony Giddens sebuah kajian filosofis

Bambang Wahyu Hidayat

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=20250935&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Permasalahan kekuasaan tidak hanya berhubungan dengan otoritas negara dalam mengatur tata hidup warganya melalui pengaturan strategis. Tetapi ada beberapa unsur yang mendukung terbentuk dan berkembangnya suatu kekuasaan. Salah satunya adalah inovasi dan perkembangan teknologi yang turut merencanakan bentuk kekuasaan yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. Melalui perkembangan teknologi, kekuasaan tidak dapat diukur berdasarkan otoritas teritorial suatu bangsa. Dalam konteks ini, kekuasaan menyebar ke segenap penjuru dunia karena keterjaringan manusia modern dalam suatu sistem global. Individu dan masyarakat yang terpisah oleh batas geografis dan teritorial dapat dipantau secara langsung melalui perangkat teknologi. Melalui perkembangan teknologi pula, negara mampu memperbesar kekuasaannya secara global karena pola interaksi dengan kelompok atau institusi atau melalui mekanisme koordinasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Berangkat dari permasalahan di atas, tesis ini berusaha menyingkap permasalahan kekuasaan tersebut dalam kehidupan modern melalui akumulasi beberapa aspek pemikiran Anthony Giddens dalam teori strukturasinya seperti bagaimana teori strukturasi memahami konsep kekuasaan dan relevansi antara kekuasaan dengan perubahan sosial. Bagi Giddens, kekuasaan merupakan kapasitas transformatif yang melekat secara inheren pada pelaku. Konteks kekuasaan muncul dalam suatu pembentukan dan pengembangan praktik sosial di mana pelaku mengambil bagian dan terlibat dalam praktik sosial tersebut. Kekuasaan bukan merupakan tindakan khusus melainkan tindakan rutin antar pelaku dalam mencapai tujuan bersama dengan pelaku yang lain serta upaya pelaku dalam mengamankan hasil-hasil interaksi yang telah dicapai. Kekuasaan yang semula melekat secara alamiah pada pelaku kemudian berkembang menjadi kekuasaan institusional karena pola-pola interaksi antar pelaku dilakukan berdasarkan kerangka kolektif yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengembangkan praktik sosial yang dijalannya secara bersama-sama. Kekuasaan lahir dari ketidaksamaan kesempatan para pelaku dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada, entah itu sumber daya material maupun sumber daya manusia. Ketika kekuasaan dipahami sebagai kapasitas transformatif yang melekat pada pelaku berdasarkan tindakan rutin yang dilakukan maka kekuasaan itu sendiri mengenal perubahan karena adakalanya pola interaksi yang selama ini dijalani menjadi usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. Pelaku dalam situasi ini melakukan introspeksi dengan praktik sosialnya melalui perentangan tindakannya dengan realitas sosial tersebut